

DAMPAK LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM KEMAJUAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA TOMOLI SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Hanny A. Joardin¹, Restutanti Borman², Renata Adellina BR.

Simanjutak³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Aziz Lamadjido Palu. Jl.
Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah
Email: hanny.perumnas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak lingkungan dan infrastruktur desa dalam kemajuan ekonomi masyarakat di Desa Tomoli Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat di Desa Tomoli Selatan masi dalam perkembangan baik pemberdayaan dan keadaan desa pun bisa di yakini kondusif telah berjalan cukup baik melalui dukungan dan keterlibatan masyarakat tomoli selatan untuk mencapai ekonomi yang sejahtera. Infrastruktur di Desa Tomoli Selatan terdiri dari jalan, jalan desa, jembatan. Faktor keberhasilan infrastruktur di Desa Tomoli Selatan didukung oleh sumber daya manusia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui infrastruktur, dukungan pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga. Faktor kendala Infrastruktur di Desa Tomoli Selatan adalah kerancuan posisi Infrastruktur sebagai institusi sosial dan komersial, kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme Infrastruktur, pemahaman perangkat desa mengenai Infrastruktur masih kurang, kepemimpinan dan manajerial pemerintah desa dan direksi Infrastruktur, dan konsep pembangunan desa yang masi belum stabil. Dampak lingkungan yang berpengaruh pada ekonomi di desa tomoli selatan adalah dampak lingkungan masyarakat yang kurang dalam pendidikan dan keterbatasan pengetahuan dalam mengembangkan lahan yang mereka kelolah, dan lingkungan yang infrastuktur yang harus terus di gencat dalam memaksimal kan pertumbuhan Ekonomi di desa Tomoli Selatan

Kata Kunci: Lingkungan, Infrastruktur, Ekonomi Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the impact of the environment and village infrastructure on the economic progress of the community in South Tomoli Village. The type of research used is qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The analysis method used is qualitative analysis. The results of this study indicate that the community environment in South Tomoli Village is still in the development of both empowerment and village conditions can be believed to be conducive and have been running quite well through the support and involvement of the South Tomoli community to achieve a prosperous economy. Infrastructure in South Tomoli Village consists of roads, village roads, bridges. The success factors of infrastructure in South Tomoli Village are supported by human resources, community participation and empowerment through infrastructure, government support and cooperation with third parties. The constraints of infrastructure in South Tomoli Village are the ambiguity of the position of infrastructure as a social and commercial institution, policies that have not directed the professionalism of infrastructure, the understanding of village officials regarding infrastructure is still lacking, the leadership and managerial of the village government and the directors of infrastructure, and the concept of village development which is still unstable. The environmental impacts that affect the economy in South Tomoli Village are the impacts of the community's environment that is lacking in education and limited knowledge in developing the land they manage, and the infrastructure environment that must continue to be accelerated in maximizing economic growth in South Tomoli Village.

Keywords: Environment, Infrastructure, Community Economy.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang harus semakin giat melakukan pembangunan agar dapat terus berkembang dan tidak tertinggal dengan negara lainnya. Pada beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia di banyak wilayah di Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat. Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur fisik sebagai suatu sektor vital dalam mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peran pemerintah sebagai mobilisator

pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya.¹

Pembangunan ekonomi di daerah berkembang maupun daerah maju pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang dapat di lihat melalui tingkat kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana pembangunan ekonomi menurut Kuncoro adalah proses penciptaan lingkungan oleh masyarakat yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, suatu daerah harus ditopang dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata, yang dapat menarik investor untuk melakukan penanaman modal (investasi) baik dalam daerah ataupun dari luar daerah yang dapat menyerap tenaga kerja. Kesempatan kerja yang tersedia secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat yang menggambarkan tingkat kesejahteraan Masyarakat.²

Permasalahan yang sering ditemui dalam pembangunan perekonomian adalah permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Kedua permasalahan tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan terpenuhinya semua kebutuhan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Tingginya tingkat pengangguran akan berdampak pada tingkat kemiskinan, karena masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga daya beli masyarakat turun, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat ikut menurun. Sebagaimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan

¹ Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

² Samugyo Ibnu Redjo. "Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

masyarakat ada delapan yaitu pertama pendapatan, kedua konsumsi atau pengeluaran keluarga, ketiga keadaan tempat tinggal, keempat fasilitas tempat tinggal, kelima kesehatan anggota keluarga, keenam kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, ketujuh kemudahan masuk ke jenjang pendidikan, kedelapan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.³

Pembangunan masyarakat desa memiliki arti yakni pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya. Berbagai sudut pandang yang dapat digunakan dalam menelaah pedesaan yaitu, pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri, disisi lain memandang bahwa pembanguan pedesaan sebagai suatu interaksi dalam masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan desa.⁴

Usaha untuk menggalakkan desa yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat indonesia yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Pembangunan desa merupakan hal yang harus diprioritaskan dengan meningkatkan status desa dengan bantuan yang seminimum mungkin dari pemerintah. Artinya, sedapat mungkin menggerakkan partisipasi masyarakat, pemerintah memang berkewajiban menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab seperti jalan utama, listrik, telepon, sarana

³ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Modul Pegangan Peserta Pelatihan Bagi Pelatih Manajemen Pemerintah Desa*.

⁴ Emi Haryati, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur", *ejournal Ilmu Pemerintahan*.

pendidikan dan hal inilah yang dialami salah satu desa yang terletak di kabupaten enrekang, desa tersebut sebelum direlokasi tidak dijangkau oleh alat-alat transportasi atau dengan kata lain masih jauh dari infrastuktur dasar, namun setelah direlokasi masih ada sebagian masyarakat yang tetap memilih untuk tinggal atau menetap di desa sebelumnya.⁵

Pembangunan masyarakat desa memiliki arti yakni pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya. Berbagai sudut pandang yang dapat digunakan dalam menelaah pedesaan yaitu, pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri, disisi lain memandang bahwa pembanguan pedesaan sebagai suatu interaksi dalam masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan desa.

Usaha untuk menggalakkan desa yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat indonesia yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Pembangunan desa merupakan hal yang harus diprioritaskan dengan meningkatkan status desa dengan bantuan yang seminimum mungkin dari pemerintah. Artinya, sedapat mungkin menggerakkan partisipasi masyarakat, pemerintah memang berkewajiban menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab seperti jalan utama, listrik, telepon, sarana pendidikan dan hal inilah yang dialami salah satu desa yang terletak di kabupaten enrekang, desa tersebut sebelum direlokasi

⁵ Sahdan, Gregorius. Dkk. 2006. *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD Yogyakarta.

tidak dijangkau oleh alat-alat transportasi atau dengan kata lain masih jauh dari infrastuktur dasar, namun setelah direlokasi masih ada sebagian masyarakat yang tetap memilih untuk tinggal atau menetap di desa sebelumnya.⁶

Desa Tomoli Selatan merupakan salah satu desa di Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Desa Tomoli Selatan merupakan salah satu Desa Pemekaran dari Desa Induk Tomoli yang ada di Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Luas Wilayah Desa sebesar ± 10 Km². Yang terdiri dari 3 Dusun. Tomoli Selatan terletak disebelah Utara Ibu Kota Kabupaten Parigi Moutong dengan jarak ± 51 Km dari Ibu Kota Parigi. Jumlah Penduduk Desa Tomoli Selatan Tahun 2022 adalah 1217, Jiwa terdiri dari 621 Laki-laki dan 596 Perempuan. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 332 KK, jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Satu sebanyak 125 KK. Pendapatan per kapita di Kecamatan ini sebesar 28.681.153.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Lingkungan dan Infrastuktur Desa Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat di Desa Tomoli Selatan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah dampak lingkungan dan infrastuktur desa dalam kemajuan ekonomi masyarakat di Desa Tomoli Selatan?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan dimana melalui teknik pengumpulan, pengolahan,

⁶ Samugyo Ibnu Redjo. “Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah”, Jurnal Ekonomi Pembangunan.

penyederhanaan, penyajian dan analisis data, dan memberikan gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa melalui observasi.⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka yang akan dianalisis, seperti jumlah dan data-data lain yang menunjang penelitian ini. Data kualitatif, yaitu data dalam bentuk informasi, baik yang diperoleh secara lisan maupun tulisan, yang berperan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

D. HASIL PENELITIAN

1. Dampak Lingkungan dan Infrastruktur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tomoli Selatan.

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi ditingkat perdesaan. Lembaga ekonomi ditingkat perdesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat desa Tomoli Selatan menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada di desa Tomoli Selatan masuk dalam kategori keluarga sejahtera, yaitu keluarganya sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan juga kebutuhan seperti pendidikan dan interaksi dengan keluarga serta lingkungan tempat tinggal.

⁷ S, Mulyadi. 2013. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi kemajuan suatu wilayah. Wilayah Desa Tomoli Selatan merupakan wilayah dengan kondisi alam yang relative masih alami. Disisi lain, SDM yang dimiliki oleh Desa Tomoli Selatan terhitung berada dalam jumlah yang banyak sehingga di butuhkan upaya agar bagaimana bisa ketersediaan potensi ini dapat dikelola dengan baik. Desa Tomoli Selatan menyimpan banyak potensi terutama potensi perkebunan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Tomoli Selatan:

“potensi di desa kami ini cukup banyak terutama pertanian dan perkebunan, seperti cokelat, kopi dan masih banyak lagi”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa potensi di Desa Bakubakuli didominasi oleh hasil pertanian dan perkebunan, karena sebagian besar penduduk Desa Tomoli Selatan merupakan petani.

Oleh karena itu program badan usaha milik desa (INFRASTRUKTUR) telah membantu meningkatkan kualitas masyarakat dan memberdayakan masyarakat dengan adanya faktor lain. Program dari INFRASTRUKTUR bisa memaksimalkan di bidang unit usaha simpan pinjam untuk masyarakat desa Tomoli Selatan. Infrastruktur belum dapat dikatakan berkembang tapi Pembina infrastruktur selaku kepala desa yang menjadi pembina dari infrastruktur menyatakan kelompok pembina ini memiliki keyakinan untuk perkembangan yang lebih positif kedepannya dengan kepengurusan yang lebih baik lagi dan juga unit-unit usaha baru yang akan dikembangkan seperti lembaga micro finance atau lembaga keuangan mikro yang akan membantu masyarakat untuk membuka peluang usaha ataupun mengembangkan usaha yang salah satu dimiliki oleh masyarakat desa Tomoli Selatan.⁸

⁸ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Infrastruktur adalah

“Partisipasi masyarakat dalam implementasi program Infrastruktur tersebut masih belum optimal”

Menurut Ketua Infrastruktur Tomoli Selatan yang mengatakan bahwa:

“Setahu saya sejak tahun 2005 Infrastruktur di berbagai daerah sudah menyebar dimana-mana khususnya bagian daerah yang tertinggal perekonomiannya, tapi Infrastruktur Tomoli Selatan baru diresmikan dan mulai beroperasi menjalankan kegiatan-kegiatannya pada 2016 dan sejauh ini Infrastruktur Tomoli Selatan sudah di kenal baik oleh masyarakat kami.”

Jadi dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan dalam hal infrastruktur dianggap mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Meskipun membawa dampak positif tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur jalan juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Berkurangnya lahan pertanian dan hutan di Desa Tomoli Selatan. Teori pertumbuhan baru mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian bangsa. Dimana teori ini memasukkan infrastruktur sebagai input yang mempengaruhi output serta menjadi sumber untuk meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi.⁹ Eksternalitas infrastruktur ternyata dapat mempengaruhi kegiatan produksi dengan memberikan aksesibilitas, kemudahan dan kemungkinan kegiatan produksi menjadi semakin produktif lagi. Dalam hal ini infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap manfaat secara ekonomi. Oleh karena itu dapat kita lihat pada perubahan-perubahan yang terjadi pada manfaat ekonomi

⁹ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol 1 No 6.

secara langsung dipengaruhi oleh perubahan pada infrastruktur jalan.

2. Faktor Keberhasilan Infrastruktur Desa Tomoli Selatan

a. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan sebuah program dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah program. Antara lain sumber daya finansial, sumber daya alam, dan potensi-potensi lain yang dapat mendukung berhasilnya sebuah program. Begitu pula dalam pelaksanaan Infrastruktur Tomoli Selatan sumber daya-sumber daya tersebut sangat berpengaruh. Yang pertama sumber daya manusia, dalam proses pelaksanaan Infrastruktur Tomoli Selatan tidak hanya unsur Pemerintah Desa dan pengurus saja yang berperan.

b. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Infrastruktur.

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa guna kelTomoli Selatanran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program Infrastruktur bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan pengelola Infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Infrastruktur. Ketika berdiri pada akhir tahun 2022, Infrastruktur Tomoli Selatan perencanaan dan pembentukannya merupakan prakarsa masyarakat atas intervensi dari Pemerintah Desa. Intervensi disini adalah adanya perPalolongan hukum yang mengatur mengenai

Infrastruktur melalui Perdes dan pengawasan kegiatan Infrastruktur.¹⁰

Selebihnya, Pemerintah Desa berperan dalam pendanaan melalui APBDes dan melihat potensi desa apa yang bisa dikembangkan melalui Infrastruktur. Dalam prosesnya dari awal hingga saat ini, Infrastruktur Tomoli Selatan tidak hanya mementingkan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tomoli Selatan. Infrastruktur Tomoli Selatan tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan mereka dengan menjadi pengurus Infrastruktur. Masyarakat yang sebelumnya menganggur dan tidak ada penghasilan tambahan bisa menjadi karyawan di unit-unit usaha ataupun bergabung dengan kelompok masyarakat yang bermitra dengan Infrastruktur.¹¹

c. Dukungan Pemerintah

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Infrastruktur, desa tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan Infrastruktur Tomoli Selatan adalah dukungan yang sangat besar dari Pemkab Parigi Moutong. Bantuan dan dukungan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diperuntukan dalam pengembangan Infrastruktur dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas pengelola Infrastruktur. Tentunya, bantuan dan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan Infrastruktur.

¹⁰ Emi Haryati, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur", *ejournal Ilmu Pemerintahan*.

¹¹ Nusa Putra. 2013. *Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

d. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Tidak hanya bantuan dari pemerintah daerah saja yang membantu dalam pengembangan unit usaha Infrastruktur. Bantuan dan kerjasama bisa dilakukan dengan pihak ketiga. Selama satu setengah tahun berdiri, Infrastruktur Tomoli Selatan sudah bekerjasama dengan pihak ketiga diantaranya toko pertanian.

3. Kendala Infrastruktur di Desa Tomoli Selatan

Badan Usaha Milik Desa (INFRASTRUKTUR) belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya. Hal ini tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti:¹²

- a) Kerancuan posisi Infrastruktur sebagai Institusi sosial dan Komersial

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan jenis usaha yang akan dikelola Infrastruktur. Dalam melaksanakan fungsinya, Infrastruktur tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri. Hal ini akan menjadi trade off bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih Infrastruktur. Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi Infrastruktur sebagai institusi sosial dan komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan Infrastruktur, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola Infrastruktur.

¹² Bahreint T. Sugihen. *Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Raja Grafind Persada, 1996)".

b) Kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme Infrastruktur

Masih banyak struktur pengelolaan Infrastruktur belum seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada pengelolaan Infrastruktur yang dijabat oleh aparatur Desa. Selain itu tidak diperjelasnya unsur pengawas Infrastruktur dalam Permendes, terlebih dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban Infrastruktur. Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas Infrastruktur yang merupakan bagian/organ dari Infrastruktur, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa.¹³

Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi moral hazard (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana Infrastruktur, kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan Infrastruktur yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi Infrastruktur memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ Infrastruktur sehingga akan memperkuat pengelolaan Infrastruktur secara umum. Hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

¹³ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol 1 No 6.

c) Pemahaman Perangkat Desa Mengenai Infrastruktur masih kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai Infrastruktur masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan pertanggungjawaban proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya butuh usaha keras untuk memahami Infrastruktur yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai Infrastruktur itulah yang membuat wacana Infrastruktur tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa.¹⁴

d) Kepemimpinan dan manajerial Pemerintah Desa dan Direksi Infrastruktur

Pemerintah desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan Infrastruktur dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Infrastruktur. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Infrastruktur dan mePalolongi terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan cita Infrastruktur. Namun jika Infrastruktur tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa untuk mengembangkan usahanya, makan akan sangat sulit bagi Infrastruktur tersebut menggerakkan potensi

¹⁴ Sahdan, Gregorius. Dkk. 2006. *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD Yogyakarta.

ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁵

e) Konsep pembangunan Desa yang keliru

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai prestasi karena ada entuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik, lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang. Dari penjelasan di atas dan hasil penelitian dari peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Infrastruktur) Teluk Pandan Rambahan disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu dalam proses kemajuan Infrastruktur dan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola, pemerintah desa kepada masyarakat, tidak adanya kebijakan pemerintah desa ketika Infrastruktur mulai tidak menunjukkan kemajuan serta kurangnya profesional pengelola dalam pengaturan manajerial operasional Infrastruktur.

E. PEMBAHASAN

Infrastruktur didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat pedesaan tentunya memiliki dasar hukum dari Pemerintah Desa yaitu tentang pengelolaan Infrastruktur. Tuntunan hukum tentang pengelolaan Infrastruktur belum dibentuk akan tetapi pemerintah daerah mengacu kepada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa berhak mendirikan lembaga usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan

¹⁵ Samugyo Ibnu Redjo. "Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah", Jurnal Ekonomi Pembangunan.

perekonomian masyarakat dan desa. Selain itu, Undang-Undang No.5 Tahun 2016 juga membahas tentang Infrastruktur akan tetapi belum dijelaskan secara rinci. Berhasil tidaknya pengelolaan Infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari cara yang dilakukan oleh pengelola dalam menjalankan setiap unit usaha dalam Infrastruktur.¹⁶

Infrastruktur merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa yang pengelolaannya berbeda dengan aset desa yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, pendapatan desa dan meningkatkan segala potensi yang dimiliki oleh desa sebagai upaya menciptakan desa yang mandiri bagi masyarakat dan desa. Kehadiran Infrastruktur merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan ekonomi diwilayah pedesaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Kehadiran Infrastruktur sebagai upaya pemberdayaan ekonomi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik karena berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari sumber financial, unit usaha maupun keterlibatan masyarakat yang masih minim.¹⁷

Pelaksanaan program Infrastruktur dimulai sejak awal berdirinya tahun 2016, sebagai program dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang bertujuan membangun perekonomian masyarakat, yang tentunya harus diikuti dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikelola dan dikembangkan. Pelaksanaan program Infrastruktur Tomoli Selatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dijalankan melalui unit usaha dengan tujuan agar mampu mengelola sumber daya yang ada dan untuk kesejahteraan masyarakat agar mampu

¹⁶ S, Mulyadi. 2013. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif*. Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Sahdan, Gregorius. Dkk. 2006. *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD Yogyakarta.

membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran terutama di wilayah Desa Tomoli Selatan.¹⁸

Pelaksanaan Infrastruktur yang diharapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah pedesaan belum sesuai harapan. Pengelolaan unit usaha yang masih terbatas menjadikan program pemberdayaan ekonomi melalui Infrastruktur belum efektif. Salah satu unit usaha yang dilakukan adalah usaha simpan pinjam, usaha ini merupakan unit usaha yang berkaitan dengan keuangan. Usaha simpan pinjam ditujukan agar mampu menyediakan modal usaha kepada masyarakat dalam mengelola ataupun menjalankan setiap usaha yang dijalankan. Unit usaha simpan pinjam sebagai usaha utama yang dijalankan oleh Infrastruktur Tomoli Selatan sampai saat ini mengalami berbagai kendala seperti penyalura dana pinjaman kepada masyarakat yang terbatas dan kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Infrastruktur Tomoli Selatan saat ini diharapkan agar mampu diselesaikan dengan baik agar tujuan yang telah direncanakan sebelumnya mampu tercapai.¹⁹

Unit usaha saprodi merupakan unit usaha yang dikelola oleh Infrastruktur melalui penyediaan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan sebagainya. Unit usaha ini telah berjalan dari awal berdirinya Infrastruktur Desa Tomoli Selatan. Tidak berbeda jauh dengan unit usaha simpan pinjam, usaha saprodi juga mengalami berbagai kendala yaitu belum mampu menyediakan kebutuhan pertanian masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya melalui wawancara, kendala dalam unit usaha ini adalah ketidakmampuan Infrastruktur dalam menyediakan

¹⁸ Nusa Putra. 2013. *Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

¹⁹ Afriniko. 2015. "Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Fakultas Hukum*. Pekanbaru.

pupuk bagi petani dan penjualan kebutuhan pertanian yang menurut masyarakat terlalu tinggi. Sehingga efek dari usaha yang dijalankan oleh Infrastruktur tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan saat ini merupakan upaya dalam percepatan pengembangan potensi dari sektor riil maupun dari perekonomian kepada suatu wilayah. Pembangunan dalam hal pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menghilangkan kesenjangan yang ada pada suatu wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.²⁰

Berdasarkan dengan temuan yang diperoleh peneliti dan aspek dari teori yang digunakan, dapat peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui Infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan dalam pembangunan sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa. Pendirian Infrastruktur dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi yang ada di Desa dan kebutuhan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Infrastruktur Tomoli Selatan harus menyeluruh secara luas kepada suatu aspek karena kemajuan suatu wilayah tidak dapat diukur dari satu aspek saja. Infrastruktur Tomoli Selatan dalam menjalankan usahanya mengalami berbagai kendala, sehingga perlu melakukan berbagai upaya kerja sama dengan pihak lain agar mampu mengelola Infrastruktur dengan baik dan selalu melakukan pemantauan terhadap program yang sudah ada dengan penggunaan manajemen yang baik agar mampu berkembang dengan baik.²¹

²⁰ Ahmad Erani Yustika. 2013. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta; Penerbit Erlangga.

²¹Bahreint T. Sugihen. *Sosiologi Pendesaan* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996)".

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Infrastruktur di Desa Tomoli Selatan telah berjalan cukup baik. Unit usaha Infrastruktur di Desa Tomoli Selatan terdiri dari usaha simpan pinjam, saprodi.
- 2) Faktor keberhasilan Infrastruktur di Desa Tomoli Selatan didukung oleh sumberdaya manusia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui Infrastruktur, dukungan pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 3) Faktor kendala Infrastruktur di Desa Tomoli Selatan adalah kerancuan posisi Infrastruktur sebagai institusi sosial dan komersial, kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme Infrastruktur, pemahaman perangkat desa mengenai Infrastruktur masih kurang, kepemimpinan dan manajerial pemerintah desa dan direksi Infrastruktur, dan konsep pembangunan desa yang keliru.

G. SARAN

- 1) Kegiatan yang di lakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak merusak sistem kegiatannya maka para pengelola Infrastruktur harus benar-benar memperhatikan pengeluaran dan pemasukan dana yang di gunakan dalam mengelola Infrastruktur, memperbanyak program-programnya serta memperbanyak mitra-mitra kerjanya agar lebih banyak suntikan dana yang dapat di gunakan untuk mengelolah usaha yang lain untuk kepentingan masyarakat dan sekali lagi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Infrastruktur sangat membantu atau meringankan beban masyarakat miskin di Desa Batetangnga tapi dengan syarat kegiatan atau usaha yang dikelolah harus dijalankan dengan baik dan sesuai koridornya masing-masing, bahkan jika program ini di berlakukan untuk setiap daerah-daerah yang

tertinggal maka daerah tersebut juga akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriniko. 2015. “*Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”. Jurnal Fakultas Hukum. Pekanbaru.
- Agunggunanto, 2016. “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1, hal 67-81.
- Ahmad Erani Yustika. 2013. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bahreint T. Sugihen. *Sosiologi Pendesaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)”.
Blogger Pemikiran Filsuf Muda. *Teori Kesejahteraan Masyarakat*. Tahun 2014.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol 1 No 6.
- Emi Haryati, “*Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*”, ejournal Ilmu Pemerintahan.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Modul Pegangan Peserta Pelatihan Bagi Pelatih Manajemen Pemerintah Desa*.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nusa Putra. 2013. *Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2007*
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan), 2007. “*Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik*

Desa (BUMDes)".Malang; Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

S, Mulyadi. 2013. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Sahdan, Gregorius. Dkk. 2006. *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD Yogyakarta.

Samugyo Ibnu Redjo. "Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah", Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung; CV Alfabeta

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.